



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak diperlukan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 86);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 83) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
10. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

11. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
12. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
15. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
16. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
17. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
18. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. informasi biasa;
 - b. terbatas;
 - c. rahasia; dan
 - d. sangat terbatas.

- (2) klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat pengamanan yang btersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - a. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - b. publik dapat mengakses informasi yang dikatagorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan Akses arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
 - a. 000 Umum
 - b. 100 Pemerintahan
 - c. 200 Politik
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
 - e. 400 Kesejahteraan
 - f. 500 Perekonomian
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
 - h. 700 Pengawasan
 - i. 800 Kepegawaian
 - j. 900 Keuangan

BAB III
PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
- (2) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sebagai berikut:
 - a. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada

- pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
- c. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan

- c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada Tanggal 28 Juni 2019

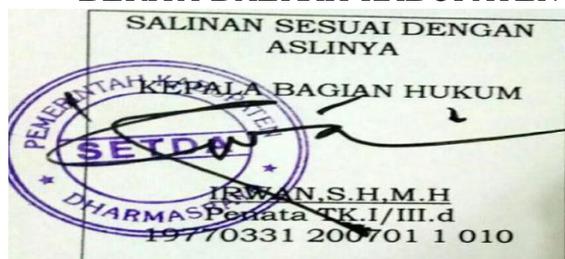
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 27



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 26 TAHUN 2019

Tanggal : 28 Juni 2019

Tentang : PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

I	UMUM					
NO	KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Garuda Kebangsaan			Yang mengganggu	
		- Daerah			Kinerja Instansi	
		- Propinsi				
		- Kota/Kabupaten				
	002	Penghargaan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Bintang			Yang mengganggu	
		- Satya Lencana			Kinerja Instansi	

		- Samkarya Nugraha				
		- Monumen				
		- Penghargaan secara adat				
	003	- Hari Raya/Besar	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Nasional 17 Agustus, hari pahlawan Dsb			Yang mengganggu	
		- Keagamaan Idul Fitri/Natal			Kinerja Instansi	
		- Hari Ulang Tahun (HUT)				
	006	Tanda Jabatan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Pamong Praja			Yang mengganggu	
		- Tanda Pengenal			Kinerja Instansi	
		- Pejabat Lainnya				
	007	- Himbauan/Seruan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
2	010	PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	

	012	Rumah Dinas	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Tanah Untuk Rumah Dinas			Yang mengganggu	
		- Perabot			Kinerja Instansi	
	013	Mess/Gues House	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	014	Jasa (Listrik, Telekomunikasi, Air)	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	019	Protokol	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		- Upacara termasuk Parade			Yang mengganggu	
		- Upacara Pelantikan			Kinerja Instansi	
		- Pementasan Kesenian				
		- Rapat Dinas				
		- Penerima Tamu				
3	020	PERALATAN/BARANG (TERMASUK PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN				
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang

						teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak		Bidang teknis
				Yang mengganggu		
				Kinerja Instansi		
023	Perabot Kantor	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak		Bidang teknis
				Yang mengganggu		
				Kinerja Instansi		
024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak		Bidang teknis
				Yang mengganggu		
				Kinerja Instansi		
025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak		Bidang teknis
				Yang mengganggu		
				Kinerja Instansi		
026	Senjata	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak		Bidang teknis
				Yang mengganggu		
				Kinerja Instansi		

	027	Mesin/Alat Berat	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	028	Inventaris, Ketatausahaan Barang (Kartu Inventaris	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		Barang/Kartu Inventaris Ruangan			Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
		Meliputi : Barang bergerak dan barang tidak bergerak				
		Tanah dan Gedung	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
		Kendaraan Dinas, Mesin/Alat Berat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
		Mobiler	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	

		Kekayaan Daerah Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang teknis
		-			Yang mengganggu	
		-			Kinerja Instansi	
5	040	PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan				
		1. Deposit (Seperti : Karya cetak,karya rekam,Bibliografi, Katalog Induk Daerah,pengolahan bahan pustaka,daftar tambahan buku,dll)	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi	Bidang teknis
		2. Layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka (seperti : layanan informasi,promosi,dan pemasyarakatan perpustakaan,perawatan bahan pustaka,dll	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Instansi	Bidang teknis
		3. Pembinaan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
		4. Penyiangan bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	

	042	Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	045	Kearsipan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengembangan Sistem Kearsipan			Yang mengganggu	
		2. Penataan Arsip			Kinerja Instansi	
		3. Penyusutan (Pemindahan, penyerahan, pemusnahan)				
		4. Pemeliharaan/Perawatan Arsip (Konversi, Laminasi)				
		5. Pembinaan Kearsipan				
		6. Layanan Informasi Kearsipan				
	046	Persandian	Rahasia	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang teknis
					Keamanan Rahasia	
					Negara	
6	050	PERENCANAAN				
		(Seperti : Renstra, Properda, Pembangunan Provinsi,				
		Kab/Kota, Evaluasi dan Pelaporan termasuk				

		Lakip				
051		Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pemerintah Pusat			Yang mengganggu	
		2. Pemerintah Provinsi			Kinerja Instansi	
		3. Pemerintah Kabupaten/Kota				
		4. Pemerintah Nagari/Kelurahan				
		5. Legislatif MPR/DPR				
		6. DPRD Provinsi				
		7. DPRD Kabupaten/Kota				
		8. Hukum				
		9. Hubungan Luar Negeri				
052		Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Kepartaian			Yang mengganggu	
		2. Organisasi kemasyarakatan			Kinerja Instansi	
		3. Organisasi Profesi dan fungsional				
		4. Organisasi Kepemudaan				
		5. Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan				
		6. Organisasi Perempuan				
		7. Pemilihan Umum				
053		Bidang Keamanan dan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis

		1. Pertahanan			Yang mengganggu	
		2. Kemiliteran			Kinerja Instansi	
		3. Keamanan				
		4. Pertahanan Sipil				
		5. Kejahatan				
		6. Bencana				
		7. Kecelakaan				
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pembangunan nagari/Kelurahan			Yang mengganggu	
		2. Kependidikan			Kinerja Instansi	
		3. Kebudayaan				
		4. Kesehatan				
		5. Agama				
		6. Sosial				
		7. kependudukan				
		8. Media Massa				
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Perdagangan			Yang mengganggu	
		2. Pertanian			Kinerja Instansi	
		3. Perindustrian				
		4. Pertambangan/Energi				

		5. Perhubungan				
		6. Tenaga Kerja				
		7. Permodalan				
		8. Perbankan dan Moneter				
		9. Agraria				
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengairan			Yang mengganggu	
		2. Jalan			Kinerja Instansi	
		3. Jembatan				
		4. Bangunan Termasuk IMB				
		5. Tata Ruang Kota				
		6. Tata Lingkungan				
		7. Ketenagaan				
		8. Peralatan				
		9. Air Minum				
	057	Bidang Pengawasan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Bidang pemerintahan			Yang mengganggu	
		2. Bidang Politik			Kinerja Instansi	
		3. Bidang Keamanan/Ketertiban				
		4. Bidang kesejahteraan Rakyat				
		5. Bidang Perekonomian				

		6. Bidang Pekerjaan Umum dan Ketenagaan				
		7. Bidang Kepegawaian				
		8. Bidang Keuangan				
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengadaan			Yang mengganggu	
		2. Mutasi			Kinerja Instansi	
		3. Kedudukan				
		4. Kesejahteraan Pegawai				
		5. Cuti				
		6. Penilaian				
		7. Tata Usaha Kepegawaian				
		8. Pemberhentian Pegawai				
		9. Pendidikan/Pelatihan				
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Anggaran			Yang mengganggu	
		2. Otorisasi			Kinerja Instansi	
		3. Verifikasi				
		4. Pembukuan				
		5. Perbendaharaan				
		6. Pembinaan Kebendaharaan				
		7. Pendapatan				

		8. Bendaharawan				
7	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	065	Ketatalaksanaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	066	Analisa Jabatan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang

						teknis
					Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
8	070	PENELITIAN SESUAI DENGAN MASALAH BIDANG PENELITIANNYA				
		(Seperti : Riset, Survey, Uji Coba, dll)				
	071	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pemerintah Pusat			Yang mengganggu	
		2. Pemerintah Propinsi			Kinerja Instansi	
		3. Pemerintah Kabupaten/Kota				
		4. Pemerintah Nagari/kelurahan				
		5. Legislatif MPR/DPR				
		6. DPRD Propinsi				
		7. DPRD Kabupaten Kota				
		8. Hukum				
		9. Hubungan Luar Negeri				
	072	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Kepartaian			Yang mengganggu	
		2. Organisasi Kemasyarakatan			Kinerja Instansi	
		3. Organisasi Profesi dan Fungsional				
		4. Organisasi Kepemudaan				

		5. Organisasi Buruh,Tani dan Nelayan				
		6. Organisasi Perempuan				
		7. Pemilihan Umum				
	073	Bidang Keamanan/Ketertiban	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pertahanan			Yang mengganggu	
		2. Kemiliteran			Kinerja Instansi	
		3. Keamanan				
		4. Pertahanan Sipil				
		5. Kejahatan				
		6. Bencana				
		7. Kecelakaan				
	074	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pembangunan Nagari/Kelurahan			Yang mengganggu	
		2. Kependidikan			Kinerja Instansi	
		3. Kebudayaan				
		4. Kesehatan				
		5. Agama				
		6. Sosial				
		7. Kependudukan				
		8. Media Massa				
	075	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang

						teknis
		1. Perdagangan			Yang mengganggu	
		2. Pertanian			Kinerja Instansi	
		3. Perindustrian				
		4. Pertambangan/Energi				
		5. Perhubungan				
		6. Tenaga Kerja				
		7. Permodalan				
		8. Perbankan dan Moneter				
		9. Agraria				
	076	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengairan			Yang mengganggu	
		2. Jalan			Kinerja Instansi	
		3. Jembatan				
		4. Bangunan termasuk IMB				
		5. Tata Ruang Kota				
		6. Tata Lingkungan				
		7. Ketenagaan				
		8. Peralatan				
		9. Air Minum				
	077	Bidang Pengawasan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis

		1. Bidang Pemerintahan			Yang mengganggu	
		2. Bidang politik			Kinerja Instansi	
		3. Bidang Keamanan/Ketertiban				
		4. Bidang Kesejahteraan Rakyat				
		5. Bidang Perekonomian				
		6. Bidang Pekerjaan umum dan ketenagaan				
		7. -				
		8. Bidang Kepegawaian				
		9. Bidang Keuangan				
078		Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengadaan			Yang mengganggu	
		2. Mutasi			Kinerja Instansi	
		3. Kedudukan				
		4. Kesejahteraan Pegawai				
		5. Cuti				
		6. Penilaian				
		7. Tata Usaha Kepegawaian				
		8. Pemberhentian Pegawai				
		9. Pendidikan/Pelatihan				
079		Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Anggaran			Yang mengganggu	

		2. Otorisasi			Kinerja Instansi	
		3. Verifikasi				
		4. Pembukuan				
		5. Perbendaharaan				
		6. Pembinaan Kebendaharaan				
		7. Pendapatan				
		8. -				
9	080	KONFERENSI				
	081	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pemerintah Pusat			Yang mengganggu	
		2. Pemerintah Propinsi			Kinerja Instansi	
		3. Pemerintah Kabupaten/Kota				
		4. Pemerintah Nagari/Kelurahan				
		5. Legislatif MPR/DPR				
		6. DPRD Propinsi				
		7. DPRD Kabupaten/Kota				
		8. Hukum				
		9. Hubungan Luar Negeri				
	082	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Kepartaian			Yang mengganggu	
		2. Organisasi Kemasyarakatan			Kinerja Instansi	

		3. Organisasi Profesi dan Fungsional				
		4. Organisasi Kepemudaan				
		5. Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan				
		6. Organisasi Perempuan				
		7. Pemilihan Umum				
		8. -				
		9. -				
	083	Bidang Keamanan/Ketertiban	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pertahanan			Yang mengganggu	
		2. Kemiliteran			Kinerja Instansi	
		3. Keamanan				
		4. Pertahanan Sipil				
		5. Kejahatan				
		6. Bencana				
		7. Kecelakaan				
		8. -				
		9. -				
	084	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pembangunan Nagari/Kelurahan			Yang mengganggu	
		2. Kependidikan			Kinerja Instansi	
		3. Kebudayaan				

		4. Kesehatan				
		5. Agama				
		6. Sosial				
		7. Kependudukan				
		8. Media Massa				
		9. -				
	085	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Perdagangan			Yang mengganggu	
		2. Pertanian			Kinerja Instansi	
		3. Perindustrian				
		4. Pertambangan/Energi				
		5. Perhubungan				
		6. Tenaga Kerja				
		7. Permodalan				
		8. Perbankan dan Moneter				
		9. -				
	086	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengairan			Yang mengganggu	
		2. Jalan			Kinerja Instansi	
		3. Jembatan				
		4. Bangunan termasuk IMB				

		5. Tata Ruang Kota				
		6. Tata Lingkungan				
		7. Ketenagaan				
		8. Peralatan				
		9. Air Minum				
087		Bidang Pengawasan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Bidang Pemerintahan			Yang mengganggu	
		2. Bidang Politik			Kinerja Instansi	
		3. Bidang Keamanan/Ketertiban				
		4. Bidang Kesejahteraan Rakyat				
		5. Bidang Perekonomian				
		6. Bidang Pekerjaan Umum				
		7. -				
		8. Bidang Kepegawaian				
		9. Bidang keuangan				
088		Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Pengadaan			Yang mengganggu	
		2. Mutasi			Kinerja Instansi	
		3. Kedudukan				
		4. Kesejahteraan Pegawai				
		5. Cuti				

		6. Penilaian				
		7. Tata Usaha Kepegawaian				
		8. Pemberhentian Pegawai				
		9. Pendidikan dan Pelatihan				
	089	Bidang keuangan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		1. Anggaran			Yang mengganggu	
		2. Otorisasi			Kinerja Instansi	
		3. Verifikasi				
		4. Pembukuan				
		5. Perbendaharaan				
		6. Pembinaan Kebendaharaan				
		7. Pendapatan				
		8.				
		9. Bendaharawan				
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					Instansi	
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

					instansi	
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis	
	1. Perjalanan keluar negeri			mengganggu kinerja		
	2. Perjalanan Keluar daerah/Provinsi			instansi		
	3. Perjalanan dalam daerah					
094	Perjalanan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis	
	1. Perjalanan keluar negeri			mengganggu kinerja		
	2. Perjalanan Keluar daerah/Provinsi			instansi		
	3. Perjalanan dalam daerah					
	4. Perjalanan Dalam Kota					
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis	
				mengganggu kinerja		
				instansi		

II PEMERINTAHAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	110	PEMERINTAH PUSAT				
	113	Kabinet	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	114	Departemen Dalam Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	115	Departemen Lainnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	116	Lembaga Pemerintah Non departemen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	117	Lembaga Pemerintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu kinerja	
					instansi	
2	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	04	Penyusunan laporan daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	042	Monografi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
		1. Koordinasi			mengganggu kinerja	
		2. Pembinaan, Ketataprajaan			instansi	
		3. Pembinaan Otonomi Daerah				
		4. Penyiapan data pengembangan daerah				
		5. Penyiapan data Sumber Pendapatan daerah				
	121	Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan,	Biasa/Terbuka	Esselon II	Tidak memiliki dampak	Bidang teknis
		Pemberhentian, Serahterima jabatan			Yang mengganggu	
					Kinerja Instansi	
	122	Badan-badan Pertimbangan Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	

					instansi	
	123	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	124	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	125	Penyerahan Urusan/Pelimpahan Wewenang	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
		Penyusunan Laporan Daerah			instansi	
3	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
	04	Monografi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		1. Koordinasi			mengganggu kinerja	
		2. Pembinaan, Ketataprajaan			instansi	
	042	3. Pembinaan Otonomi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		4. Penyiapan data pengembangan daerah			mengganggu kinerja	
		5. penyiapan data sumber Pendapatan			instansi	

		daerah				
	131	Pencalonan,pengangkatan,pelantikan, Pemberhentian,serahterima jabatan,	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang teknis
	132	Badan-badan pertimbangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	133	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	134	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	135	Penyerahan urusan/pelimpahan wewenang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
4	140	PEMERINTAH NAGARI/KELURAHAN				
		Pembentukan Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

	140.1				yang	
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan,	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang teknis
		Pemilihan, Meninggal,			Dampak yang	
		Pengangkatan, Pemberhentian, dan			Mengganggu kinerja	
		sebagainya			instansi	
	142	Kekayaan Nagari/kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	143	Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan,	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang teknis
		Pemberhentian,serahterima jabatan badan			Dampak yang	
		Perwakilan			Mengganggu kinerja	
					instansi	
	144	Administrasi Nagari/kelurahan	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	146	Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan,	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang teknis
		Pemberhentian,serahterima jabatan			Dampak yang	
		lembaga-				
		Lembaga tingkat Nagari			Mengganggu kinerja	

					instansi	
	147	Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan, Pemberhentian,serahterima jabatan lembaga- Lembaga Adat	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu kinerja instansi	Bidang teknis
	148	RT-RW-RK	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu kinerja instansi	Bidang teknis
5	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD				
	151	Keanggotaan MPR	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bidang Teknis
	152	Persidangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang menggangu kinerja instansi	Bidang Teknis
	153	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
					instansi	
	154	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	155	Keanggotaan DPR/DPD	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	156	Persidangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	157	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	

	158	Jawaban Pemerintah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	159	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
6	160	DPRD PROVINSI				
	161	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	162	Persidangan/Rapat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	163	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
					instansi	
	164	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	165	Sekretaris DPRD Provinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	166	Badan Kelengkapan Dewan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
7	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	

					instansi	
	172	Persidangan/Rapat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	175	Sekretaris DPRD Provinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	176	Badan Kelengkapan Dewan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
					instansi	
8	180	HUKUM				
	180.1	Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	

					instansi	
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
	181	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
		Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
		Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
					instansi	
		Tata Usaha Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Agama	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		Militer, HAM, Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	182	Hukum Adat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	

	185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja	
					instansi	
		Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	186	Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	189	Keputusan/Instruksi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		1. Keputusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu kinerja	
					instansi	
		2. Instruksi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
9	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
	193	Kerjasama dengan Negara Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
		1. Bilateral dan Multilateral			mengganggu kinerja	
					instansi	
	194	Perwakilan RI diluar Negeri	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	195	Laporan Luar Negeri	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

III POLITIK						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
	201	Kebijaksanaan Umum	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Meliputi : Kebijakan umum dibidang politik baik			Dampak yang	
		Tingkat pusat maupun daerah			Mengganggu kinerja	
					instansi	
2	210	KEPARTAIAN				
		Meliputi Pendaftaran partai, AD/ART, Lambang,	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Pengurus Partai			Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Berdasarkan Perjuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

	222	Berdasarkan Kekaryaan (Pepabri, Wredatama,dll)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	223	Berdasarkan Keagamaan (seperti : Muhammadiyah,NU,Persatuan Tarikat Islam	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	224	Berdasarkan Kedaerahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	225	Lembaga Swadaya Masyarakat (seperti : PKDP,YLKI)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	226	Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja	
					instansi	
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	Organisasi Kesehatan (IDI,IBI)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	232	Organisasi Guru (PGRI)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	233	Organisasi Sarjana (Ikatan Sarjana Hukum Indonesia)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	234	Organisasi Kepengacaraan (Persatuan Advokat Indonesia)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	236	Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja instansi	
	237	Organisasi Wartawan Indonesia	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	238	Ikatan Cendekiawan Indonesia	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	239	Organisasi Profesi Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI KEPEMUDAAN				
	241	Komite nasional pemuda indonesia	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis

					instansi	
	243	Organisasi Pelajar	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	245	Organisasi Pemuda Kepartaian	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	246	Organisasi Kepemudaan Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN				
	251	Organisasi Pekerja (Seperti : Serikat pekerja Seluruh	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Indonesia,dll)			Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	

	252	Organisasi Buruh Internasional (Seperti : ILO,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	253	Organisasi Tani Indonesia (Seperti : HKTI,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	254	Organisasi Nelayan (Seperti : HNSI,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
7	260	ORGANISASI PEREMPUAN				
	261	Dharmawanita	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	262	PKK	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	263	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu kinerja	
					instansi	
	264	Persit Katika Chandra Kirana	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	265	Bayangkari	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	266	Bundo Kanduang	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	267	Organisasi Perempuan Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja instansi	
8	270	PEMILIHAN UMUM				
		(Meliputi : DPR,DPRD,Presiden,Gubernur,Bupati/ Walikota dan Walinagari)				
	271	Penyelenggaraan Pemilu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
		1. Partai Peserta Pemilu				
		2. Sosialisasi Pendataan pemilih dan Pencalonan				
		3. Kampanye termasuk masa tenang				
		4. Pemilih Pemilu				
		5. Tanda Gambar				
		6. Sarana dan Prasarana				
		7. Pemungutan Suara				
		8. Anggaran Pemilu				
		9. Panitia Pengawas Pemilu termasuk Pemantauan Pemilu				
	272	Penyelenggara Pemilu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis
		1. Komisi Pemilihan Umum Tingkat Pusat				

					kinerja	
		2. Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi			instansi	
		3. Komisi Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota				
		4. Panitia Pemilihan Kecamatan				
		5. Panitia Pemungutan Suara				
		6. KPPS				

IV KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
	301	Keamanan Perbatasan Provinsi Kab/Kota/Nagari	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	Keamanan Kantor dan Rumah Dinas	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat		Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan
						Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	312	Laut		Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan
						Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	313	Udara		Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan
						Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	

					Kabupaten dharmasraya	
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa naan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan Dilingkungan pemerintah Kabupaten dharmasraya	Bidang,seksi, Sub bagian
	325	Karya Bakti Militer	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan Terganggunya keamanan Dilingkungan pemerintah Kabupaten dharmasraya	Bidang,seksi, Sub bagian
4	330	KEAMANAN				

	331	Kepolisian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
	332	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
	333	Jagawana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat	Terbuka/Biasa	Esselon II	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar/Pemberontakan (Meliputi : Kerusuhan, Anarkis)	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan	Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	352	Pembunuhan	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan	Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	353	Penganiayaan/Pencurian,Perampasan	Rahasia	Esselon III	Mengakibatkan	Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten	

					dharmasraya	
	354	Subversi, Penyelundupan, Narkoba	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan	Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	355	Pemalsuan	Rahasia	Esselon II	Mengakibatkan	Bidang,seksi,
					Terganggunya keamanan	Sub bagian
					Dilingkungan pemerintah	
					Kabupaten dharmasraya	
	356	Korupsi, Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
		KKN			mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
	358	Kenakalan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
	359	Kejahatan dan Pelanggaran Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
7	360	BENCANA				
	361	Gunung Berapi/Gempa	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	362	Banjir/Tanah Longsor	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	

					instansi	
	363	Angin Topan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	364	Kebakaran	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	365	Kekeringan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
8	370	KECELAKAAN				
	371	Darat	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	372	Laut	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	373	Udara	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	374	Sungai/Danau	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	375	Tempat Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	

V KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	410	PEMBANGUNAN NAGARI/KELURAHAN				
	411	Pembinaan Sosial Budaya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
		1. Gotong Royong			naan fungsi dan	
		2. Lembaga Sosial Nagari (LSN)			Tugas perangkat	
		3. Latihan Kerja Masyarakat			Daerah unit kerja	
		4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga				
		5. Penyuluhan Masyarakat Nagari/Kelurahan				
	412	Perekonomian Nagari/Kelurahan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Usaha Produksi masyarakat termasuk pengo-			Dampak yang	
		Lahan, pemasaran, Pendistribusian			Mengganggu kinerja	
		2. Keuangan nagari/kelurahan termasuk LPN			instansi	
		3. Koperasi Nagari/Kelurahan				
		4. Penataan pembangunan nagari/kelurahan				
		5. Bantuan pembangunan nagari/kelurahan				

		6. Pelaksanaan bantuan pembangunan nagari				
	413	Pembangunan Pemeliharaan sarana prasarana nagari	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Pembinaan			Dampak yang	
		2. Pemukiman			Mengganggu kinerja	
		3. Masyarakat Pradesa/pranagari/kelurahan			instansi	
		4. Pemugaran perumahan				
		5. Lingkungan hidup				
	414	Pengembangan nagari/Kelurahan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Tingkat Perkembangan nagari/kelurahan			Dampak yang	
		2. Unit daerah kerja pembangunan (UDKP)			Mengganggu kinerja	
		3. Tata nagari/kelurahan			instansi	
		4. Perlombaan nagari/Kelurahan				
		5. Pemekaran nagari/kelurahan				
	415	Koordinasi internal dan eksternal				
2	420	KEPENDIDIKAN				
	421	Pendidikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Dasar (seperti : TK,Playgroup,dll)			Dampak yang	
		2. Menengah (seperti Pendidikan umum,			Mengganggu	

					kinerja	
		Kejuruan,dll)			instansi	
		3. Tinggi				
		4. Khusus (seperti : SLB)				
		5. Pendidikan Luar Sekolah (seperti: Kursus,dll)				
	422	Administrasi sekolah (seperti : Persyaratan masuk	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Sekolah,tahun ajaran,hari besar,biaya pendidikan)			Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	423	Metode Belajar (seperti :teknik mengajar,praktek	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Lapangan,kurikulum dan penilaian).			Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	424	Tenaga pengajar (seperti:guru,dosen,instruktur dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

	424	Tenaga pengajar (seperti:guru,dosen,instruktur dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	425	Sarana pendidikan (seperti :gedung,buku,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	426	Keolahragaan (seperti: sarana dan kegiatan keolah Ragaan)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	427	Kepemudaan/Kegiatan remaja (seperti :karang Taruna,pertukaran pemuda,remaja mesjid,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	

					instansi	
	428	Kepramukaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	429	Sanggar Kegiatan belajar	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
3	430	KEBUDAYAAN	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
	431	Kesenian			Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	432	Kepurbakalaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	433	Sejarah	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	434	Bahasa	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	435	Kepercayaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	436	Legenda	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	437	Adat Istiadat	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
4	440	KESEHATAN				
	441	Pembinaan Kesehatan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		a. Gizi			Dampak yang	
		b. Mata			Mengganggu kinerja	
		c. Jiwa			instansi	
		d. Kanker				
		e. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
		f. Perawatan				
		Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)				
		Pekan Imunisasi Nasional				
	442	Obat-obatan	Terbuka/Biasa	Esselon	Memiliki dampak	Bidang

				III	yang	Teknis
		a. Pengadaan			mengganggu Pelaksa	
		b. Penyimpanan			naan fungsi dan Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
	443	Penyakit Menular	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		a. Pencegahan			Dampak yang Mengganggu kinerja	
					instansi	
		b. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1) Kusta			Dampak yang Mengganggu kinerja	
		2) Kelamin			instansi	
		3) Frambosia				
		4) TBC/AIDS/HIV				
		c. Epidemilogi dan Karantina	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang

						Teknis
		1) Kholera			Dampak yang	
		2) Imunisasi			Mengganggu kinerja	
					instansi	
	444	Gizi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Kekurangan makanan			Dampak yang	
		2. Bahaya kelaparan			Mengganggu kinerja	
		3. Busung Lapar			instansi	
		4. Keracunan makanan				
	445	Rumah Sakit	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Balai kesehatan			Dampak yang	
		2. Puskesmas Lingkungan			Mengganggu kinerja	
		3. Poliklinik			instansi	
		4. Posyandu				
	446	Tenaga Medis	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	447	Alat Medis	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	448	Pengobatan Tradisional	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Tusuk jarum			Dampak yang	
		2. Jamu tradisional/herbal			Mengganggu kinerja	
		3. Dukun/paranormal			instansi	
	449	Apotik,Optik dan Rumah Obat	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
5	450	AGAMA				
	451	Islam (Meliputi : Peribadatan rumah ibadah,tokoh	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang

						Teknis
		Agama,rumah ibadat,pendidikan agama,harta			Dampak yang	
		Agama,organisasi keagamaan)			Mengganggu kinerja	
					instansi	
	452	Protestan (Meliputi : Peribadatan rumah ibadah, Tokoh agama,rumah ibadat, organisasi keagamaan)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	453	Katolik (Meliputi : Peribadatan rumah ibadah, Tokoh agama,rumah ibadat, organisasi keagamaan)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	454	Hindu (Meliputi : Peribadatan rumah ibadah, Tokoh agama,rumah ibadat, organisasi keagamaan, Rohaniawan)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	

	455	Hindu (Meliputi : Peribadatan rumah ibadah, Tokoh agama,rumah ibadat, organisasi keagamaan, Rohaniawan)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu kinerja instansi	Bidang Teknis
	456	Urusan Haji	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu kinerja instansi	Bidang Teknis
	457	Agama Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu kinerja instansi	Bidang Teknis
6	460	SOSIAL				
	461	Rehabilitasi Penderita cacat (cacat fisik,cacat Mental,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Menggangu	Bidang Teknis

					kinerja	
					instansi	
	462	Tuna Susila (Gelandangan, pengemis, Tuna susila, Anak nakal, dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	463	Kesejahteraan Anak, Perempuan, dan Keluarga	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	464	Pembinaan Pahlawan (Penghargaan, cacat Veteran)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	465	Kesejahteraan Sosial (penanganan lanjut usia, Korban kekacauan, pengungsi, Repatriasi)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	466	Sumbangan sosial (Pencarian dana dan Pendistribusian,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	467	Bimbingan sosial (bimbingan terhadap masyarakat Suku terasing,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	468	Palang Merah Indonesia (PMI)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	469	Pemakaman (seperti : TMP,TPU,Rematorium,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
7	470	KEPENDUDUKAN				
	471	Pendaftaran Penduduk (meliputi : Identitas	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang
		Penduduk,perpindahan penduduk,dll)				Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	472	Pencatatan sipil (kelahiran,kematian,Adopsi,	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang
		Perkawinan,perceraian,pengangkatan,pengakuan,dll)				Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	473	Informasi kependudukan (Teknologi informasi,	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang
		Kelembagaan dan sumberdaya informasi,dll)				Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

	474	Proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	475	Keluarga berencana	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		1. Pendewasaan Usia Perkawinan			Dampak yang	
		2. Pengaturan Kelahiran			Mengganggu kinerja	
		3. Pembinaan ketahanan keluarga			instansi	
		4. Peningkatan kesejahteraan keluarga				
8	480	MEDIA MASSA				
	481	Penerbitan (meliputi: hal-hal yg berkaitan dengan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
		Penerbitan)			Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	482	Radio (meliputi : RRI, Radio Swasta)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	483	Televisi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	484	Film	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	485	Pers	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	486	Grafika	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	487	Penerangan (seperti: Pameran dan kehumasan,dll)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	488	Operation Room	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

VII PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata bangunan konstruksi, industri konstruksi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
			Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	601	Kontraktor, pemborong			Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	
			Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	602	Arsitektur			Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	
			Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu	Bidang Teknis
	603	Bahan bangunan			Dampak yang Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	604	Instalasi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	605	Konstruksi pencegahan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	606	Laboratorium pekerjaan umum dan ketenagaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
2	610	PENGAIRAN				
	611	Irigasi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

	612	Polder	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksnaan fungsi dan Tugas perangkat Daerah unit kerja	Bidang Teknis
	613	Pasang surut	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	614	Pengendalian Sungai	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	615	Pengaman Pantai	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	616	Air Tanah	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
3	620	JALAN				
	621	Jalan Kota	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	622	Jalan Luar Kota	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
4	630	JEMBATAN				
	631	Jembatan Pada jalan kota	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	632	Jembatan Pada jalan luar kota	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja instansi	
5	640	BANGUNAN TERMASUK IMB				
	641	Rumah	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	642	Bangunan pendidikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	643	Bangunan Rekreasi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

					Instansi	
	645	Bangunan Pelayanan Umum	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	646	Bangunan Peninggalan Sejarah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu	
					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
					Daerah unit kerja	
	647	Bangunan Industri	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	648	Bangunan Tempat Tinggal	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	

	649	Elemen Bangunan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
6	650	TATA RUANG KOTA				
	651	Daerah Perdagangan/Pelabuhan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	653	Daerah Perumahan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	654	Daerah Industri	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	655	Daerah Rekreasi (Open Space)	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	656	Area Transportasi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	657	Assanieering	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	658	Kesehatan Lingkungan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	

					instansi	
	659	Advice Planning	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
7	660	TATA LINGKUNGAN				
	661	Daerah Hutan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	662	Daerah Pertanian	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	663	Daerah Pemukiman	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	

					instansi	
8	670	KETENAGAAN				
	671	Kelistrikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	672	Tenaga Air	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa naan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	673	Tenaga minyak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa naan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	674	Tenaga Gas	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	675	Tenaga Matahari	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	676	Tenaga Nuklir	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	677	Tenaga Panas Bumi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	678	Tenaga Uap	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu	

					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	679	Tenaga Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
10	690	AIR MINUM				
	691	Intake	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	692	Transmisi air baku	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	693	Instalasi Pengelolaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja instansi	
	694	Distribusi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang	Bidang Teknis
					Mengganggu kinerja instansi	

VIII PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN				
	701	Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	706	Bidang Organisasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
	711	Pemerintah Pusat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis
					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	712	Pemerintah Propinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis
					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	713	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis
					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	714	Pemerintah Nagari/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	715	Legislatif MPR/DPR	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	716	DPRD Propinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	717	DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	718	Hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	719	Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
3	720	BIDANG POLITIK				
	721	Kepartaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	722	Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	

					Tugas perangkat	
	723	Organisasi Profesi dan fungsional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	724	Organisasi Kepemudaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	725	Organisasi Buruh,Tani dan Nelayan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	726	Organisasi Perempuan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	727	Pemilihan Umum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN				
	731	Pertahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	732	Kemiliteran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	733	Keamanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	734	Pertahanan Sipil	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	735	Kejahatan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang	Bidang Teknis
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	736	Bencana	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang	Bidang Teknis
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	737	Kecelakaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	741	Pembangunan nagari/kelurahan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	742	Kependidikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	743	Kebudayaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	744	Kesehatan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	745	Agama	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	746	Sosial	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	747	Kependudukan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	748	Media Massa	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN				

	751	Perdagangan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	752	Pertanian	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	753	Perindustrian	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	754	Pertambangan/Energi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	755	Perhubungan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	756	Tenaga Kerja	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	757	Permodalan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	758	Perbankan dan Moneter	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	759	Agraria	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				

	761	Pengairan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	762	Jalan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	763	Jembatan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	764	Bangunan termasuk IMB	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	765	Tata Ruang Kota	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu	Bidang Teknis

					kinerja	
					instansi	
	766	Tata Lingkungan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	767	Ketenagaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	768	Peralatan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	769	Air Minum	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
7	770	PENGAWASAN				

	771	Bidang Pemerintah	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	772	Bidang Politik	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	773	Bidang keamanan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	774	Bidang kesejahteraan Rakyat	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	775	Bidang perekonomian	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	

					kinerja	
					instansi	
	776	Bidang PU dan Ketenagaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
	778	Bidang kepegawaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu	
					Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	779	Bidang Keuangan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	
					instansi	
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Pengadaan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu	
					kinerja	

					instansi	
	782	Mutasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	783	Kedudukan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	784	Kesejahteraan Pegawai	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	785	Cuti	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

	786	Penilaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	787	Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	788	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan Tugas perangkat	
	789	Pendidikan/Pelatihan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Anggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	792	Otorisasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	793	Verifikasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	794	Pembukuan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksa	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	795	Perbendaharaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	796	Pembinaan Kebendaharaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	797	Pendapatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	

IX KEPEGAWAIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	810	PENGADAAN				
	811	Lamaran	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	812	Seleksi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	813	Pengangkatan Calon Pegawai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	814	Pengujian Kesehatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	815	Pengangkatan Tenaga Lepas	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	816	Pengangkatan Tenaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
2	820	MUTASI				
	821	Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
	1	Pengangkatan menjadi pegawai negeri Sipil			mengganggu Pelaksa	
	2	Pengangkatan dalam jabatan			naan fungsi dan	
	2.1	Struktural			Tugas perangkat	
	2.2	Fungsional				
	3	Pemberhentian dari jabatan				
	822	Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	823	Kenaikan Pangkat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	824	Pemindahan, Pelimpahan, Perbantuan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	825	Data Sering	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	826	Penunjukan Tugas Belajar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
3	830	KEDUDUKAN				

	831	Perhitungan masa kerja	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian pangkat/gaji	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	833	Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	834	Jenjang pangkat/Eselonering	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
4	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	841	Tunjangan			mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
			Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
	842	Dana			mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
			Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
	843	Perawatan Kesehatan			mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	844	Distribusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	845	Tanah/Perumahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	846	Bantuan Sosial	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	847	Rekreasi/Olahraga	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
5	850	CUTI				
	851	Cuti Tahunan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	852	Cuti Sakit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	853	Cuti Melahirkan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis
					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	

	854	Cuti Diluar Tanggungan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	855	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	856	Cuti Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
6	860	PENILAIAN				
	861	Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	862	Hukuman				
	1	Ringan				

	2	Sedang				
	3	Berat				
	863	Kondite	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	864	Ujian Dinas	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	865	Penilaian Kehidupan Pegawai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
7	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				

	871	Formasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	872	Bezzeting/DUK	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	873	Registrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	875	Kewenangan Kepegawaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	876	Penggajian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	877	Sumpah/Janji Pegawai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	878	Korps Kepegawaian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
8	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI				
	881	Permintaan Sendiri	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	

	882	Dengan Hak Pensiun	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	883	Karena meninggal Dunia	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	884	Alasan lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	885	Uang Pesangon	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	886	Pemberhentian untuk sementara waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
9	890	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	891	Perencanaan Diklat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	892	Penyelenggaraan Pendidikan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	893	Metode Pendidikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	894	Fasilitas belajar/Pendidikan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	895	Tenaga Pengajar	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	

					Mengganggu kinerja instansi	
	896	Administrasi Pendidikan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	897	Evaluasi dan Laporan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	898	Sarana Diklat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis

X KEUANGAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	900	KEUANGAN				
	901	Nota Keuangan	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	902	Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	903	Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	904	Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis

2	910	ANGGARAN				
	911	Belanja Administrasi Umum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	912	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	913	Belanja Modal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	914	Perubahan Anggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaksaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	915	Dana Alokasi Satuan Kerja (DASK)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
3	920	OTORISASI				
	921	Belanja Administrasi Umum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	922	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	923	Belanja Modal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
4	930	VERIFIKASI				
	931	SPM BAU	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	932	SPM BOP	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	933	SPM Belanja Modal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	934	Penerimaan (Daftar P.6-P.7)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	935	SPJ BAU	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	936	SPJ BOP	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	937	SPJ Belanja Modal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	938	Teguran SPJ	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	939	SPJ Nagari	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	

					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	942	Laporan (Bulanan, Triwulan, Tahunan)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	943	Register (meliputi B.IV, B.V, B.IX)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW pasal 74)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	

	953	Penghapusan Kekayaan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	954	Pengangkatan, Pergantian atasan langsung, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang Mengganggu kinerja instansi	Bidang Teknis
	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu Pelaknaan fungsi dan Tugas perangkat	Bidang Teknis
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas				
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak	Bidang Teknis

					yang	
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
					mengganggu Pelaksa	
					naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
8	970	PENDAPATAN				
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
	1	Bagi Hasil Pajak (PBB,BPHTB,PPH OP,dan PPH Psl 21)			mengganggu Pelaksa	
	2	Bagi Hasil Bukan Pajak (IHH,IHPH,Eksplorasi, Eksploitasi, Royalti)			naan fungsi dan	
					Tugas perangkat	
	972	Subsidi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	973	Pajak	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	

					instansi	
	974	Retribusi	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	975	Bea	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	976	Cukai	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	
	977	Bantuan/Pendapatan Lainnya	Terbuka/Biasa	Esselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis
					Dampak yang	
					Mengganggu kinerja	
					instansi	

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

